

BAB II

ANALISIS DAN PERANCANGAN

2.1 PERANCANGAN TABEL

Perancangan tabel yang dibuat pada tugas akhir ini adalah :

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Tabel Jabatan. | 6. Tabel Biaya_Jabat. |
| 2. Tabel Pegawai. | 7. Tabel Tarif. |
| 3. Tabel Harta. | 8. Tabel PTKP. |
| 4. Tabel Kewajiban. | 9. Tabel SPT. |
| 5. Tabel Keluarga. | 10. Tabel Perusahaan. |

Berikut adalah rincian dari tabel – tabel yang telah dibuat :

2.1.1 TABEL JABATAN

Tabel jabatan berfungsi untuk menyimpan data – data seluruh jabatan..

Primary Key : Kd_Jabat

Tabel 2.1 Tabel Jabatan

No.	Nama Field	Type	Keterangan
1.	Kd_Jabat *	Char (3)	Kode Jabatan
2.	Nm_Jabat	Varchar (15)	Nama Jabatan
3.	T_jabat	Int	Tunjangan Per Jabatan

2.1.2 TABEL PEGAWAI

Tabel Pegawai berfungsi untuk menyimpan data – data seluruh pegawai

Primary Key : NIP., Foreign Key : Kd_Jabat

Tabel 2.2 Tabel Pegawai

No.	Nama Field	Type	Keterangan
1.	NIP *	Char (8)	No. Induk Pegawai
2.	Kd_Jabat **	Char (3)	Kode Jabatan
3.	NPWP	Char (20)	NPWP Lengkap
4.	NPWP1	Char (2)	NPWP 2 Digit Pertama
5.	NPWP2	Char (3)	NPWP 3 Digit Kedua
6.	NPWP3	Char (3)	NPWP 3 Digit Ketiga
7.	NPWP4	Char (1)	NPWP 1 Digit Keempat
8.	NPWP5	Char (3)	NPWP 3 Digit Kelima
9.	NPWP6	Char (3)	NPWP 3 Digit Keenam
10.	nama	Varchar (25)	Nama Pegawai
11.	alamat	Varchar (25)	Alamat Pegawai
12.	Agama	Varchar (10)	Agama Pegawai
13.	JK	Char (2)	Jenis Kelamin
14.	SK	Char (2)	Status Kawin
15.	Tanggungan	Char (2)	Jumlah Tanggungan Pegawai
16.	no_telp1	Char (4)	No Telepon Pegawai (4 digit pertama)
17.	no_telp2	Char (8)	No Telepon Pegawai (8 digit kedua)
18.	no_fax1	Char (4)	No Fax Pegawai (4 digit pertama)
19.	no_fax2	Char (8)	No Fax Pegawai (8 digit kedua)
20.	email	Varchar (30)	Email Pegawai
21.	gapok	Int	Gaji Pokok Pegawai
22.	PKKerja	Int	Premi Kecelakaan Kerja
23.	PKKematian	Int	Premi Jaminan Kematian
24.	Iuran_Pensiun	Int	Iuran Pensiun Pegawai
25.	Iuran_JHT	Int	Iuran Jaminan Hari Tua
26.	P_Bruto	Varchar (15)	Penghasilan Bruto/Bulan
27.	P_BrutoT	Varchar (15)	Penghasilan Bruto/Tahun
28.	B_Jabat	Varchar (15)	Biaya Jabatan Pegawai

29.	PN_Bulan	Varchar (15)	Penghasilan Netto/Bulan
30.	PN_Tahun	Varchar (15)	Penghasilan Netto/Tahun
31.	zakat	Varchar (15)	Zakat Keagamaan
32.	PN_TahunZ	Varchar (15)	Penghasilan Netto/Tahun Setelah Zakat
33.	PTKP	Varchar (15)	Penghasilan Tidak Kena Pajak
34.	PKP	Varchar (15)	Penghasilan Kena Pajak
35.	PH_Tahun	Varchar (15)	Pajak Penghasilan/Tahun
36.	PH_Bulan	Varchar (15)	Pajak Penghasilan/Bulan

2.1.3 TABEL HARTA

Tabel harta berfungsi untuk menyimpan data – data seluruh harta pegawai.. Primary Key : Kd_Harta, Foreign Key :NIP

Tabel 2.3 Tabel Harta

No.	Nama Field	Type	Keterangan
1.	Kd_Harta*	Int	Kode Harta (auto_increment)
2.	NIP**	Char (8)	No. Induk Pegawai
2.	J_Harta	Varchar (25)	Jenis Harta
3.	Tahun_P	year (4)	Tahun Perolehan
4.	Hrg_P	Int	Harga Perolehan
5.	Ket	varchar (20)	Keterangan

2.1.4 TABEL KEWAJIBAN

Tabel kewajiban berfungsi untuk menyimpan data – data seluruh kewajiban/utang pegawai.

Primary Key : Kd_Kewajiban, Foreign Key : NIP

Tabel 2.4 Tabel Kewajiban

No.	Nama Field	Type	Keterangan
1.	Kd_Kewajiban*	int	Kode Kewajiban (auto_increment)
2.	NIP**	char (8)	No. Induk Pegawai
3.	Nm_P	varchar (25)	Nama Pemberi Pinjaman
4.	Almt_P	varchar (25)	Alamat Pemberi Pinjaman
5.	Tahun_P	year (4)	Tahun Peminjaman
6.	Jumlah	int	Jumlah kewajiban/utang

2.1.5 TABEL KELUARGA

Tabel keluarga berfungsi untuk menyimpan data – data dari kartu keluarga seluruh pegawai.

Primary Key : Kd_Keluarga, Foreign Key : NIP

Tabel 2.5 Tabel Keluarga

No.	Nama Field	Type	Keterangan
1.	Kd_Keluarga*	int	Kode Keluarga (auto_increment)
2.	NIP**	char (8)	No. Induk Pegawai
3.	Nm_K	varchar (25)	Nama Anggota Keluarga
4.	T_Lahir	date (8)	Tanggal Lahir
5.	Hub_K	Varchar (10)	Hub. Keluarga
6.	Pek_K	varchar (20)	Pekerjaan Anggota Kel.

2.1.6 TABEL BIAYA_JABAT

Tabel Biaya Jabat berfungsi untuk menyimpan data-data biaya jabatan yang akan dikalikan dengan penghasilan bruto pegawai.

Primary Key : Kd_BJabat

Tabel 2.6 Tabel Biaya Jabat

No.	Nama Field	Type	Keterangan
1.	Kd_BJabat *	Varchar (2)	Kode Biaya Jabat
2.	B_Jabat	Int	Persentase Biaya Jabat
3.	B_max	Int	Batas Maksimal Biaya Jabat

2.1.7 TABEL PTKP

Tabel PTKP berfungsi untuk menyimpan data-data aturan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku.

Primary Key : Kd_PTKP

Tabel 2.7 Tabel PTKP

No	Nama Field	Type	Keterangan
1.	Kd_PTKP *	Varchar (2)	Kode Penghasilan Tidak Kena Pajak
2.	Pribadi	Int	PTKP bagi Wajib Pajak Pribadi
3.	Kawin	Int	PTKP bagi Wajib Pajak Kawin
4.	Tanggungan	Int	PTKP bagi Wajib Pajak yang memiliki tanggungan
5.	J_Tanggungan	int	Jumlah tanggungan maksimal yang mendapatkan PTKP

2.1.8 TABEL TARIF

Tabel Tarif berfungsi untuk menyimpan data-data tariff PPH Pasal 21 yang berlaku.

Primary Key : Kd_Tarif

Tabel 2.8 Tabel Tarif

No.	Nama Field	Type	Keterangan
1.	Kd_Tarif *	Int	Kode Tarif (auto_increment)
2.	B_min	Int	Batas Minimum
3.	B_max	Int	Batas Maksimal
4.	Persen	Int	Persentase Pajak

2.1.9 TABEL SPT

Tabel SPT berfungsi untuk menyimpan data batasan penghasilan bruto/tahun pegawai yang menentukan jenis formulir SPT .

Primary Key : Kd_SPT

Tabel 2.9 Tabel SPT

No.	Nama Field	Type	Keterangan
1.	Kd_SPT *	Char (3)	Kode SPT
2.	B_SPT	Int	Batasan penghasilan bruto/tahun pegawai

2.1.10 TABEL PERUSAHAAN

Tabel perusahaan berfungsi untuk menyimpan data-data perusahaan yang berhubungan dengan SPT.

Primary Key : Kd_P

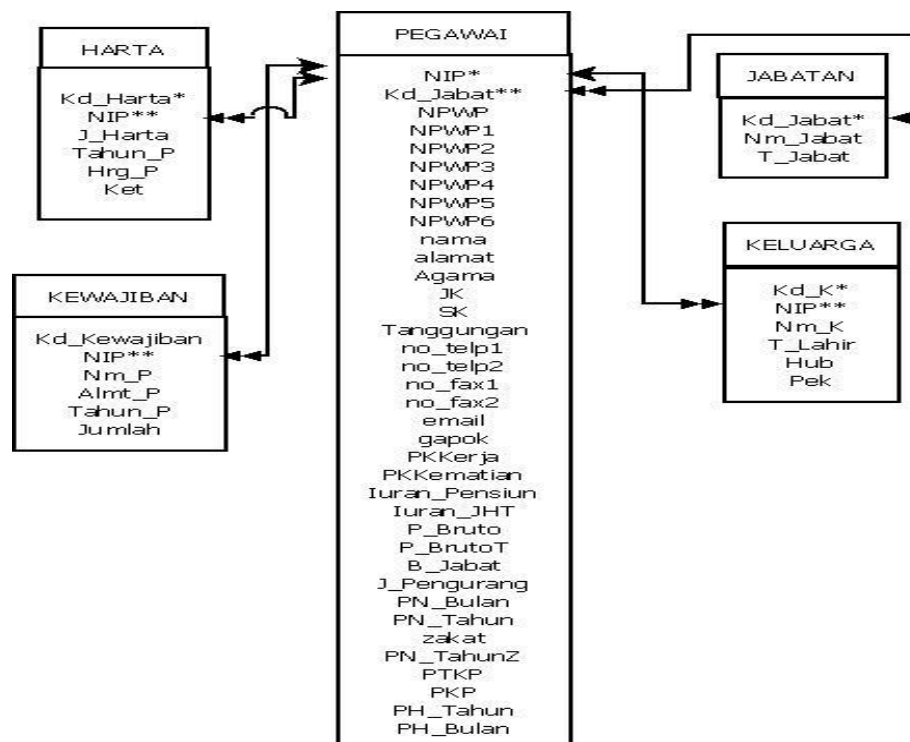
Tabel 2.10 Tabel Perusahaan

No.	Nama Field	Type	Keterangan
1.	Kd_P *	Char (3)	Kode Perusahaan
2.	Nm_P	varchar (35)	Nama Perusahaan
3.	NPWP	Char (20)	NPWP Lengkap

4.	NPWP1	Char (2)	NPWP 2 Digit Pertama
5.	NPWP2	Char (3)	NPWP 3 Digit Kedua
6.	NPWP3	Char (3)	NPWP 3 Digit Ketiga
7.	NPWP4	Char (1)	NPWP 1 Digit Keempat
8.	NPWP5	Char (3)	NPWP 3 Digit Kelima
9.	NPWP6	Char (3)	NPWP 3 Digit Keenam
10.	Alamat	varchar (35)	Alamat Perusahaan
11.	No_TP	Char (12)	No. Telp. Perusahaan

2.2 RELASI ANTAR TABEL

Relasi antar tabel merupakan hubungan antara tabel satu dengan yang lainnya yang ditunjukkan dengan garis, yang bersifat *one to many*, *many to many*, dan juga *many to one*. Relasi antar tabel dapat lihat pada gambar 2.1.



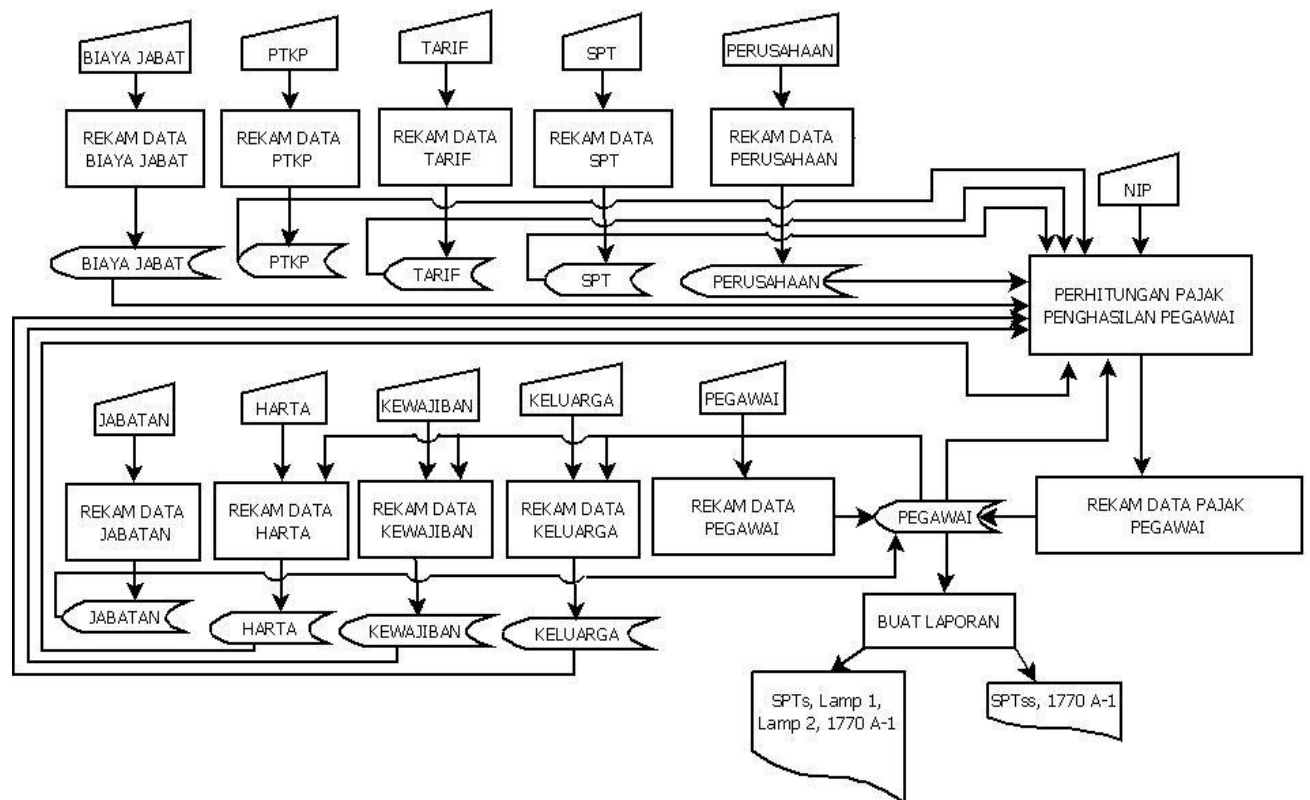
Gambar 2.1 Relasi Antar Tabel

PENJELASAN RELASI ANTAR TABEL

- Tabel pegawai memiliki relasi dengan tabel jabatan bersifat M to 1, yang artinya adalah satu kode jabatan dimiliki oleh banyak pegawai atau banyak pegawai yang memiliki jabatan yang sama.
- Tabel harta memiliki relasi dengan tabel pegawai dengan sifat M to 1, yang berarti satu NIP dapat memiliki banyak Kd_Harta atau banyak Kd_Harta memiliki NIP yang sama.
- Tabel kewajiban memiliki relasi dengan tabel pegawai dengan sifat M to 1, yang berarti satu NIP dapat memiliki banyak Kd_Kewajiban atau banyak Kd_Kewajiban memiliki NIP yang sama.
- Tabel keluarga memiliki relasi dengan tabel pegawai dengan sifat M to 1, yang berarti satu NIP dapat memiliki banyak Kd_K atau banyak Kd_K memiliki NIP yang sama.
- Selain tabel tersebut, yaitu tabel biaya jabat, tabel PTKP, tabel tarif, tabel SPT dan tabel perusahaan yang berdiri sendiri atau independent dan tidak memiliki relasi.

2.3 BAGAN ALIR SISTEM (*FLOWCHART SYSTEM*)

Bagan alir sistem digunakan untuk menggambarkan mekanisme kerja dari suatu rangkaian kegiatan yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya yang akan menghasilkan suatu informasi. Bagan alir sistem ini digambarkan pada gambar 2.2.



Gambar 2.2 Bagan Alir Sistem Sistem Perhitungan Pajak Penghasilan
PPH Pasal 21 Pegawai Tetap.

PENJELASAN BAGAN ALIR SISTEM

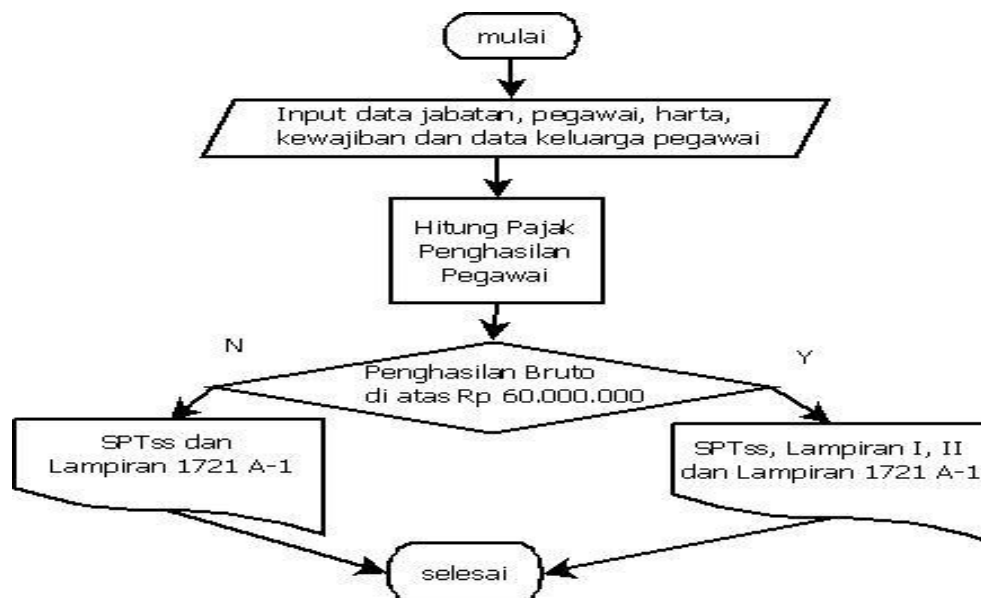
- Input data jabatan direkam atau disimpan pada tabel jabatan. Data jabatan ini digunakan pada input data pegawai.
- Input data pegawai direkam atau disimpan pada tabel pegawai. Data pegawai ini digunakan pada input data harta, kewajiban dan keluarga.
- Input data harta direkam atau disimpan pada tabel harta.
- Input data kewajiban direkam atau disimpan pada tabel kewajiban.
- Input data keluarga jabat direkam atau disimpan pada tabel keluarga.
- Input data biaya jabat direkam atau disimpan pada tabel biaya jabat.

- Input data PTKP direkam atau disimpan pada tabel PTKP. Data PTKP ini juga digunakan pada input data pegawai.
- Input data Tarif direkam atau disimpan pada tabel Tarif.
- Input data SPT direkam atau disimpan pada tabel SPT.
- Untuk membuat Laporan Pajak Penghasilan Pegawai/Tahun dibutuhkan pembacaan NIP pegawai, kunci primer dari tabel pegawai, harta, kewajiban, keluarga dan data-data dari tabel biaya jabat, PTKP, Tarif, SPT dan table perusahaan. Berdasarkan proses tersebut,. hasil perhitungan pajak kembali direkam ditabel pegawai untuk kemudian ditampilkan dalam form SPTs atau SPTss

2.4 FLOWCHART ALGORITMA PROGRAM

Flowchart program ini menunjukkan cara kerja algoritma program dari proses menginput, menghitung hingga menghasilkan output.

Flowchart program ini digambarkan pada gambar 2.3.



Gambar 2.3 Flowchart algoritma program Perhitungan PPH Pasal 21

PENJELASAN FLOWCHART PROGRAM

- Input data jabatan, pegawai, harta, kewajiban dan keluarga pegawai direkam dalam database.
- Setelah data tersebut direkam, data-data tersebut diproses untuk menghitung pajak penghasilan pegawai.
- Kemudian jika penghasilan bruto/tahun pegawai diatas Rp 60.000.000 maka hasil perhitungan tersebut dan data-data pegawai yang dibutuhkan akan dicetak pada form pajak SPTs, lampiran I, II dan lampiran 1720 A-1.
- Jika penghasilan bruto/tahun pegawai dibawah Rp 60.000.000 maka hasil perhitungan tersebut dan data-data pegawai yang dibutuhkan akan dicetak pada form pajak SPTss dan lampiran 1720 A-1.

2.5 PERANCANGAN MASUKKAN

Dalam tugas akhir, dibutuhkan beberapa perancangan masukan, yaitu :

1. Perancangan masukan Data Jabatan.
2. Perancangan masukan Data Pegawai.
3. Perancangan masukan Data Harta.
4. Perancangan masukan Data Kewajiban.
5. Perancangan masukan Data Keluarga.

Berikut perancangan – perancangan masukan data yang diperlukan :

2.5.1 PERANCANGAN MASUKAN DATA JABATAN.

Perancangan masukan data jabatan adalah untuk menyimpan data – data jabatan. Perancangan masukan data jabatan digambarkan pada gambar 2.4.

INPUT DATA JABATAN

KODE JABATAN	<input type="text"/>
NAMA JABATAN	<input type="text"/>
TUNJANGAN JABATAN	Rp <input type="text"/>
<input type="button" value="SAVE"/> <input type="button" value="RESET"/>	

Gambar 2.4 Perancangan Masukan Data Jabatan.

2.5.2 PERANCANGAN MASUKAN DATA PEGAWAI.

Perancangan masukan data pegawai adalah untuk menyimpan data – data pegawai. Perancangan masukan data pegawai digambarkan pada gambar 2.5

INPUT DATA PEGAWAI

NIP	<input type="text"/>
JABATAN	<input type="text" value=""/>
NPWP	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
NAMA	<input type="text"/>
ALAMAT	<input type="text"/>
AGAMA	<input type="text" value=""/>
JENIS KELAMIN	<input type="radio"/> L <input type="radio"/> P
STATUS KAWIN	<input type="radio"/> YA <input type="radio"/> TIDAK
TANGGUNGAN	<input type="text" value=""/>
NOMOR TELEPON	<input type="text"/> <input type="text"/>
NOMOR FAX	<input type="text"/> <input type="text"/>
EMAIL	<input type="text"/>
GAJI POKOK	Rp <input type="text"/>
PREMI KEC. KERJA	Rp <input type="text"/>
PREMI JAMINAN KEMATIAN	Rp <input type="text"/>
IURAN PENSIUN	Rp <input type="text"/>
IURAN JAMINAN HARI TUA	Rp <input type="text"/>
<input type="button" value="SAVE"/> <input type="button" value="RESET"/>	

Gambar 2.5. Perancangan Masukan Data Pegawai

2.5.3 PERANCANGAN MASUKAN DATA HARTA

Perancangan masukan data jabatan adalah untuk menyimpan data – data harta pegawai. Perancangan masukan data harta digambarkan pada gambar 2.6.

INPUT HARTA PEGAWAI

NIP	<input type="text"/>
JENIS HARTA	<input type="text"/>
HARGA PEROLEHAN	Rp <input type="text"/>
TAHUN PEROLEHAN	<input type="text"/>
KETERANGAN	<input type="text"/>

Gambar 2.6 Perancangan Masukan Data Harta.

2.5.4 PERANCANGAN MASUKAN DATA KEWAJIBAN

Perancangan masukan data kewajiban adalah untuk menyimpan data – data kewajiban pegawai. Perancangan masukan data kewajiban digambarkan pada gambar 2.7.

INPUT KEWAJIBAN PEGAWAI

NIP	<input type="text"/>
NAMA PEMBERI PINJAMAN	<input type="text"/>
ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	<input type="text"/>
TAHUN PEMINJAMAN	<input type="text"/>
JUMLAH	Rp <input type="text"/>
<input type="button" value="SAVE"/> <input type="button" value="RESET"/>	

Gambar 2.7 Perancangan Masukan Data Kewajiban.

2.5.5 PERANCANGAN MASUKAN DATA KELUARGA

Perancangan masukan data keluarga adalah untuk menyimpan data – data kartu keluarga pegawai. Perancangan masukan data keluarga digambarkan pada gambar 2.8.

INPUT DATA KELUARGA

NIP	<input type="text"/>
NAMA KELUARGA	<input type="text"/>
TANGGAL LAHIR	<input type="text"/>
HUBUNGAN	<input type="text"/>
PEKERJAAN	<input type="text"/>
<input type="button" value="SAVE"/> <input type="button" value="RESET"/>	

Gambar 2.8 Perancangan Masukan Data Keluarga.

2.6 PERANCANGAN MENU PENGATURAN

Dalam tugas akhir, dibutuhkan beberapa perancangan menu pengaturan yaitu :

1. Perancangan pengaturan Biaya Jabat.
2. Perancangan pengaturan PTKP.
3. Perancangan pengaturan Tarif.
4. Perancangan pengaturan SPT.
5. Perancangan pengaturan Data Perusahaan.

Berikut perancangan – perancangan pengaturan perhitungan pajak penghasilan yang diperlukan :

2.6.1 PERANCANGAN PENGATURAN BIAYA JABAT.

Perancangan pengaturan biaya jabat adalah untuk menyimpan data – data biaya jabat yang berlaku. Perancangan masukan data biaya jabat digambarkan pada gambar 2.9

UPDATE TARIF BIAYA JABATAN

BESARAN TARIF (%)

TARIF MAKSIMAL Rp

Gambar 2.9 Perancangan pengaturan Biaya Jabatan.

2.6.2 PERANCANGAN PENGATURAN PTKP.

Perancangan pengaturan biaya PTKP adalah untuk menyimpan data – data Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku. Perancangan pengaturan PTKP digambarkan pada gambar 2.10.

UPDATE BESARAN PTKP

WAJIB PAJAK SENDIRI Rp

WAJIB PAJAK KAWIN Rp

TANGGUNGAN WAJIB PAJAK Rp

JUMLAH TANGGUNGAN MAX

Gambar 2.10 Perancangan pengaturan PTKP.

2.6.3 PERANCANGAN PENGATURAN TARIF.

Perancangan pengaturan tarif adalah untuk menyimpan data – data tarif pajak PH Pasal 21 yang berlaku. Perancangan pengaturan tarif digambarkan pada gambar 2.11.

TAMBAH TARIF

BATAS MINIMAL Rp

BATAS MAKSIMAL Rp

PERSENTASE TARIF %

Gambar 2.11 Perancangan pengaturan Tarif.

2.6.4 PERANCANGAN PENGATURAN SPT.

Perancangan pengaturan data SPT adalah untuk menyimpan data – data batasan penghasilan bruto/tahun yang berlaku untuk menentukan jenis form pajak yang digunakan. Perancangan pengaturan SPT digambarkan pada gambar 2.12.

UPDATE JENIS SPT

BATAS PENGGUNAAN SPTss Rp

Gambar 2.12 Perancangan pengaturan SPT.

2.6.5 PERANCANGAN PENGATURAN DATA PERUSAHAAN.

Perancangan pengaturan data perusahaan adalah untuk menyimpan data – data perusahaan yang berhubungan dengan form SPT. Perancangan pengaturan data perusahaan digambarkan pada gambar 2.13.

UPDATE DATA PERUSAHAAN

NAMA PERUSAHAAN	<input type="text"/>
NPWP	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
NAMA	<input type="text"/>
ALAMAT	<input type="text"/>
NOMOR TELEPON	<input type="text"/>
<input type="button" value="UPDATE"/> <input type="button" value="RESET"/>	

Gambar 2.13 Perancangan pengaturan data Perusahaan.

2.7 PERANCANGAN KELUARAN

Dari perancangan-perancangan masukan yang telah dibuat, maka dapat dibuat juga perancangan – perancangan keluaran dari sistem yang dihasilkan. Perancangan keluaran yang dihasilkan dari sistem perhitungan pajak ini adalah :

1. Perancangan Keluaran Perhitungan Pajak Penghasilan Pegawai.
2. Perancangan Keluaran SPTs.
3. Perancangan Keluaran Lampiran I.
4. Perancangan Keluaran Lampiran II.
5. Perancangan Keluaran SPTss.
6. Perancangan Keluaran Lampiran 1721 A-1.

Berikut perancangan – perancangan keluaran data yang diperlukan :

2.7.1 PERANCANGAN KELUARAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PEGAWAI

Perancangan keluaran perhitungan pajak penghasilan pegawai berfungsi untuk menampilkan perhitungan pajak penghasilan / pegawai. Perancangan keluaran dari perhitungan pajak penghasilan pegawai digambarkan pada gambar 2.14

PILIH NIP -PILIH-

Nama
 NPWP
 Jabatan

PERHITUNGAN PPH		
Gaji Pokok	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
Premi Kec. Kerja	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
Premi Jaminan Kematian	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
Tunjangan Jabatan	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
Penghasilan Bruto		<input style="width: 95%;" type="text"/>
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan (5%)	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
2. Iuran Pensiun	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
3. Iuran Jaminan Hari Tua	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
		<input style="width: 95%;" type="text"/>
Penghasilan netto sebulan		<input style="width: 95%;" type="text"/>
Penghasilan netto setahun (X12)		<input style="width: 95%;" type="text"/>
PTKP :		
-untuk WP sendiri	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
-Tambah WP Kawin	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
-Tanggungan x ...	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
		<input style="width: 95%;" type="text"/>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		<input style="width: 95%;" type="text"/>
PPH Pasal 21 / Tahun		<input style="width: 95%;" type="text"/>
PPH Pasal 21 / Bulan		<input style="width: 95%;" type="text"/>
<input style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;" type="button" value="GO"/>		

Gambar 2.14 Perancangan Keluaran Perhitungan PPH Pegawai

2.7.2 PERANCANGAN KELUARAN FORM SPTs

Perancangan keluaran form SPTs berfungsi untuk menampilkan hasil perhitungan pajak penghasilan pegawai dengan penghasilan bruto diatas Rp 60.000.000 / tahun. Perancangan keluaran dari form SPTs digambarkan pada gambar 2.15.

FORMULIR	1770 S	SPT TAHUNAN	TAHUN PAJAK	2 0
	DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI		<input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE - ...
	MEMPUNYAI PENGHASILAN : • DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA • DALAM NEGERI LAINNYA • YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL			
PERHATIAN • SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" PADA <input type="checkbox"/> (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI				
IDENTITAS	NPWP :			
	NAMA WAJIB PAJAK :			
	PEKERJAAN :	KLU : <input type="text"/>		
	NO. TELEPON :	NO. FAKS : <input type="text"/>		
	PERUBAHAN DATA :	<input type="checkbox"/> LAMPIRAN TERSENDIRI <input type="checkbox"/> TIDAK ADA		
A. PENGHASILAN NETO	*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)			RUPIAH *)
	1	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN <small>[Disisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan atau Bukti Potong Lain]</small>	1	
	2	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA <small>[Disisi sesuai dengan Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A]</small>	2	
	3	PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI <small>[Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk]</small>	3	
	4	JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)	4	
	5	ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB	5	
B. PENGHASILAN KENA PAJAK	6	JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (4-5)	6	
	7	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK/ <input type="checkbox"/> K/ <input type="checkbox"/> K/L <input type="checkbox"/> PH/ <input type="checkbox"/> HB/ <input type="checkbox"/>	7	
C. PPh TERUTANG	8	PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7)	8	
	9	PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8)	9	
	10	PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	10	
D. KREDIT PAJAK	11	JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)	11	
	12	PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Disisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (7)]	12	
	13 a.	<input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (11-12)	13	
	b.	<input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT		
	14	PPh YANG DIBAYAR SENDIRI		
	14a	a. PPh PASAL 25	14a	
14b	b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)	14b		
14c	c. FISKAL LUAR NEGERI	14c		
15	JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c)	15		
E. PPh KURANG LEBIH BAYAR	16	a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) (13-15) TGL LUNAS TGL BLN THN	16	
	b.	PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)		
	17	PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 C (WP PATUH) b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 D (WP TERTENTU)		
F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERKUTNYA	18	ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR	18	
	DIHITUNG BERDASARKAN a. <input type="checkbox"/> 1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13 b. <input type="checkbox"/> PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI			
G. LAMPIRAN	a.	<input type="checkbox"/> Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21	d.	<input type="checkbox"/> Perhitungan PPh Terutang Bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau Mempunyai NPWP Sendiri
	b.	<input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak Lembar Ke-3 PPh Pasal 29	e.	<input type="checkbox"/>
	c.	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan)		
PERNYATAAN				
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.				
<input type="checkbox"/> WAJIB PAJAK <input type="checkbox"/> KUASA TANGGAL <input type="text"/>			TANDA TANGAN	

Gambar 2.15 Perancangan Keluaran form SPTs

2.7.3 PERANCANGAN KELUARAN FORM SPTs LAMPIRAN I

Perancangan keluaran form SPTs lampiran I berfungsi untuk menampilkan penghasilan lain diluar gaji pokok. Perancangan keluaran dari form SPTs lampiran I digambarkan pada gambar 2.16.

FORMULIR	1770 S - I	LAMPIRAN - I SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	TAHUN PAJAK <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">2 0</div>			
<small>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</small>		<ul style="list-style-type: none"> PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH 				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> N P W P : <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div> </div> <div style="width: 65%;"> NAMA WAJIB PAJAK : <div style="border: 1px solid black; width: 250px; height: 15px;"></div> </div> </div>						
BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA <small>(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)</small>						
NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN <small>(Rupiah)</small>				
(1)	(2)	(3)				
1.	BUNGA					
2.	ROYALTI					
3.	SEWA					
4.	PENGHARGAAN DAN HADIAH					
5.	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA					
6.	PENGHASILAN LAINNYA					
JUMLAH BAGIAN A		JBA				
Pindahkan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A Angka 2						
BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK						
NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN <small>(Rupiah)</small>				
(1)	(2)	(3)				
1.	BANTUAN/SUMBANGAN/HIBAH					
2.	WARISAN					
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI					
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA					
5.	BEASISWA					
6.	PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK					
JUMLAH BAGIAN B		JBB				
Pindahkan Jumlah Bagian B ke Formulir Induk 1770 S Bagian B Angka 2						
BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH						
NO.	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP *	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT
			NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
JUMLAH BAGIAN C				JBC		
Pindahkan Jumlah Bagian C ke Formulir Induk 1770 S Bagian D Angka 12						
Catatan : <small>*) - DTP : Ditanggung Pemerintah - Kolom (6) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP) - Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri (lihat buku petunjuk tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT Angka 3)</small>						
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUP, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI </div> <div style="display: inline-block; margin-left: 20px; font-size: small;"> Halaman ke- <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></div> dari <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></div> halaman Lampiran-I </div>						

Gambar 2.16 Perancangan Keluaran form SPTs Lampiran I

2.7.4 PERANCANGAN KELUARAN FORM SPTs LAMPIRAN II

Perancangan keluaran form SPTs lampiran II berfungsi untuk menampilkan harta, kewajiban dan data kartu keluarga pegawai. Perancangan keluaran dari form SPTs lampiran II digambarkan pada gambar 2.17.

FORMULIR		LAMPIRAN - II		TAHUN PAJAK	
1770 S - II		SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI		2 0	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		<ul style="list-style-type: none"> • PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL • HARTA PADA AKHIR TAHUN • KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN • DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA 			
N P W P					
NAMA WAJIB PAJAK					
BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL					
NO.	SUMBER/JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK/ PENGHASILAN BRUTO (Rp/taun)	PPh TERUTANG (Rp/taun)		
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERTAHAP NEGARA				
2.	BUNGA/DISKONTO OBLIGASI				
3.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK				
4.	HADIAH UNDIAN				
5.	PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSUN YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS				
6.	HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD				
7.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN				
8.	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN				
9.	BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH				
10.	BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOOPERASI KEPADA ANGGOTA KOOPERASI				
11.	PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF				
12.	DIVIDEN				
13.	PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA				
14.	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL				
JUMLAH BAGIAN A			JBA	0	
BAGIAN B : HARTA PADA AKHIR TAHUN					
NO.	JENIS HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rp/taun)	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
JUMLAH BAGIAN B			JBB	0	
BAGIAN C : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN					
NO.	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
JUMLAH BAGIAN C			JBC	0	
BAGIAN D : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA					
NO.	NAMA	TANGGAL LAHIR	HUBUNGAN KELUARGA	PEKERJAAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- dan halaman Lampiran-II

Gambar 2.17 Perancangan Keluaran form SPTs Lampiran II

2.7.5 PERANCANGAN KELUARAN FORM SPTss

Perancangan keluaran form SPTss berfungsi untuk menampilkan hasil perhitungan pajak penghasilan pegawai dengan penghasilan bruto dibawah Rp 60.000.000 / tahun. Perancangan keluaran dari form SPTss digambarkan pada gambar 2.18.

FORMULIR

1770 SS

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA DAN
TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN LAINNYA
KECUALI BUNGA BANK DAN/ATAU BUNGA KOPERASI

TAHUN PAJAK

2 0

☐ SPT PEMBETULAN KE...

PERHATIAN

- BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN INI
- BERI TANDA "X" PADA ☐ (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
- LAMPIRKAN FOTO COPY FORMULIR 1721-A1 ATAU 1721-A2*
- ISI DENGAN HURUF CETAK/ DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

IDENTITAS

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

PEKERJAAN :

NO. TELEPON : NO. FAKSIMILI :

PERUBAHAN DATA : ☐ LAMPIRAN TERSENDIRI ☐ TIDAK ADA

JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN : Rp.

JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN : Rp.

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya bertakuh di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas, dan bahwa saya tidak memperoleh penghasilan lain selain dari satu pemberi kerja.

TANDA TANGAN

TANGGAL

*) Foto copy Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 wajib dilampirkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPT 1770 SS

Petunjuk Pengisian

- Kotak SPT Pembetulan diisi dengan tanda silang (X) dan "ke ..." diisi dengan angka banyaknya melakukan pembetulan jika Wajib Pajak menyampaikan Pembetulan SPT. Jika Wajib Pajak menyampaikan SPT normal maka kotak SPT Pembetulan dan "ke ..." tersebut tidak perlu diisi.
- Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.
- Wajib Pajak wajib melampirkan formulir 1721-A1 atau 1721-A2 sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPT 1770 SS.
- Wajib Pajak yang dapat menggunakan formulir ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas baik karyawan swasta maupun PNS yang menerima penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi.
- Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan dan menyampaiakannya paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir.
- Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Setiap orang yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

FORMULIR

1770 SS

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA DAN
TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN LAINNYA
KECUALI BUNGA BANK DAN/ATAU BUNGA KOPERASI

TAHUN PAJAK

2 0 1 0

☐ SPT PEMBETULAN KE...

PERHATIAN

- BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN INI
- BERI TANDA "X" PADA ☐ (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
- LAMPIRKAN FOTO COPY FORMULIR 1721-A1 ATAU 1721-A2*
- ISI DENGAN HURUF CETAK/ DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

IDENTITAS

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

PEKERJAAN :

NO. TELEPON : NO. FAKSIMILI :

PERUBAHAN DATA : ☒ LAMPIRAN TERSENDIRI ☐ TIDAK ADA

JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN : Rp.

JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN : Rp.

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya bertakuh di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas, dan bahwa saya tidak memperoleh penghasilan lain selain dari satu pemberi kerja.

TANDA TANGAN

TANGGAL

*) Foto copy Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 wajib dilampirkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPT 1770 SS

Disisi dengan jumlah nilai perolehan dari seluruh harta yang dimiliki/dikuasai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Misalnya : rumah, kendaraan bermotor, kebun, sawah, deposito, tabungan dan lain-lain

Disisi dengan jumlah seluruh utang yang diperoleh/dimiliki, termasuk utang bunga.

Misalnya : pinjaman bank atau koperasi

Gambar 2.18 Perancangan Keluaran form SPTss

2.7.6 PERANCANGAN KELUARAN FORM LAMPIRAN 1721 A-1

Perancangan keluaran form lampiran 1721 A-1 berfungsi untuk menampilkan detail hasil perhitungan pajak penghasilan pegawai dengan form SPTs maupun SPTss. Perancangan keluaran dari form lampiran 1721 A-1 digambarkan pada gambar 2.19.

FORMULIR		1721 - A1		DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA		TAMBAH KALENDER	
						1. Lembar 1 untuk Pegawai 2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak		2 0	
NOMOR URUT :									
NPWP PEMOTONG PAJAK :									
NAMA PEMOTONG PAJAK :									
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/THT/JHT :									
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/THT/JHT :									
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/THT/JHT :									
STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING :		<input type="checkbox"/> KAWIN <input type="checkbox"/> TIDAK KAWIN <input type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN <input type="checkbox"/> KARYAWAN ASING							
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP :		K / <input type="checkbox"/> TK / <input type="checkbox"/> HB / <input type="checkbox"/>							
JABATAN :		MASA PEROLEHAN PENGHASILAN: <input type="checkbox"/> S.D. <input type="checkbox"/>							
A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :									
PENGHASILAN BRUTO :									
1. GAJI / PENSUN ATAU THT / JHT									
2. TUNJANGAN PPh									
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA									
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA									
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA									
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21									
7. JUMLAH (1 s.d. 6)									
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR									
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8)									
PENGURANGAN :									
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7									
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8									
12. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT / JHT									
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12)									
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :									
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)									
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA									
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)									
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)									
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17)									
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN									
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA									
21. PPh PASAL 21 TERUTANG									
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI									
22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah									
22b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP									
23. JUMLAH PPh PASAL 21 :									
a. YANG KURANG DIPOTONG (21 - 22)									
b. YANG LEBIH DIPOTONG (22 - 21)									
24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH									
a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN TAHUN									
b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN									
B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN									
<input type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK <input type="checkbox"/> KUASA (tempat) TOL BLN THN									
NAMA LENGKAP									
NPWP									
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN									

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Gambar 2.19 Perancangan Keluaran form lampiran 1721 A-1